

**HUKUM ACARA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2 / PID / C / 2020 /PN.JKT.TIM)

TESIS

Oleh :

GALIH MUNANDAR

201920251019



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
**HUKUM ACARA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2 / PID / C / 2020 / PN.JKT.TIM, PUTUSAN NOMOR 5 /
PID / C / 2020 / PN.JKT.TIM.)

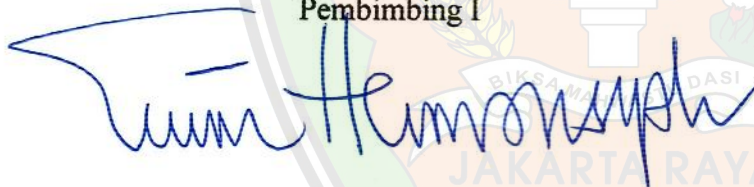
***LEGAL IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE SUPREME
COURT NUMBER 2 OF 2012 IN LITTLE
CRIMINAL PROCEDURES AT THE COURT
IN PROVINCE DKI JAKARTA FOR
IN 2018-2020***

TESIS

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis Program Studi Magister
Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jakarta, 17 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIDN : 0319046403

Pembimbing II



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.
NIDN : 0316077604

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, SH., MH.
NIDN : 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Hukum Acara Perkara Tindak Pidana
Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 02 Tahun 2012
Nama Mahasiswa : Galih Munandar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251019
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : Juni 2023

Bekasi, 17 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. Juanda, SH., MH.
NIDN : 0004056310
Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIDN : 0319046403
Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN : 0312117102

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.
NIDN : 0127117401



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH.
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GALIH MUNANDAR

NPM : 201920251019

Ttl : Jakarta, 26 April 1992

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul “Hukum Acara Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 17 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



GALIH MUNANDAR

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : GALIH MUNANDAR

NPM : 201920251019

TTL : 26 April 1992

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalitas Non- Eksklusif (Non Exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Hukum Acara Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012"

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan hak bebas royalty non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 17 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



GALIH MUNANDAR

201920251019

ABSTRAK

- A. Nama : GALIH MUNANDAR, 201920251019
B. Judul Tesis : HUKUM ACARA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012
C. Jumlah Halaman : x + 129 halaman
D. Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Tipiring, dan Perma.
E. Isi Abstrak :

Dalam peradilan dikenal adanya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, yang wujud nyata, yang pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213, dimana pelaksanaannya berlaku untuk perkara tindak pidana ringan yang pelaksanaannya diatur pada Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution* (ADR), dimana seharusnya untuk perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat memungkinkan adanya upaya perdamaian antara pelaku dengan korban. Dalam praktiknya sendiri, ketentuan Perma tersebut di atas seringkali diabaikan oleh Hakim yang memeriksa perkara-perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan yang nilai objeknya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, bahkan tidak jarang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut justru diterapkan dalam perkara lain yang justru tidak diatur dalam Perma tersebut. Sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Perma pada penanganan perkara tindak pidana ringan dan Perma perlu di cabut dan materi dimasukkan kedalam KUHAP.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, Penulis menggunakan pendekatan normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam peradilan dikenal adanya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, yang wujud nyata, yang pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213, dimana pelaksanaannya berlaku untuk perkara tindak pidana ringan yang pelaksanaannya diatur pada Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution* (ADR) Sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada penanganan perkara tindak pidana ringan dan perlu di cabut dan materi dimasukkan kedalam KUHAP.

- G.Pembimbing/Promotor : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

ABSTRACT

- A. Name : GALIH MUNANDAR, 201920251019
B. Thesis Title : LEGAL PROCEDURE FOR MISE CRIMINAL
ACTIONS BASED ON SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 02 OF 2012
C. Number of Pages : x + 129 pages
D. Keywords : Criminal Procedure Code, Tipiring, and Perma.
E. Contents of the Abstract :

In the judiciary, it is known that there is a principle of simple justice, fast and low cost, which is real, the regulation of which is contained in the Criminal Procedure Code regarding Examination of Short Procedures, and Articles 205 to 213, where the implementation applies to cases of minor crimes whose implementation regulated in the Letter of the Chief of Police No. POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 regarding the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR), which should be for cases of minor crimes as referred to in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 to allow for peace efforts between the perpetrators with victims. In practice, the provisions of the Perma mentioned above are often ignored by judges who examine cases of theft, fraud, embezzlement and collection whose object value is below two million five hundred thousand rupiahs, and it is not uncommon for the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 to be applied. in other cases which are not regulated in the Perma. Legal sanctions from not implementing the Perma in the handling of minor criminal cases and the Perma need to be revoked and the material included in the Criminal Procedure Code.

In this study the authors used a normative juridical approach methodology supported by an empirical approach. Regarding the term normative legal research, the author uses a normative approach because the target of this research is law or rule (norm). The definition of rule includes legal principles, rules in the narrow sense (value), concrete legal regulations. Research with the object of normative law in the form of legal principles, the legal system, the level of vertical and horizontal synchronization.

The results of the study show that, in court, it is known that there is a principle of simple justice, fast and low cost, which is real, the regulation of which is contained in the Criminal Procedure Code regarding Examination of Short Procedures, and Articles 205 to 213, where the implementation applies to cases minor criminal acts whose implementation is regulated in the Chief of Police Letter No. POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 concerning handling cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) Legal sanctions for non-implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on the handling of minor criminal cases and needs to be revoked and the material entered into the Criminal Procedure Code .

- G. Advisor/Promote : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul Hukum Acara Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu di curahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa Tesis masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui Tesis ini kita dapat mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan Covid 19 serta sanksi pidana bagi pelanggar PSBB.

Penulisan Tesis ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr Dijan Widjowati, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Penguji I Tesis.
4. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Prof. Dr. Juanda, SH., MII. Selaku Ketua Penguji Tesis.
6. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. Selaku Penguji II Tesis
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada keluarga terutama kedua Orang Tua Bapak Pariman dan Ibu Sumiyem serta Mertua Bapak Saroni dan Almarhumah Aminah Binti Haji Tohir, yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa

yang di panjatkan kepada Allah SWT dalam penulisan Tesis.

9. Kepada anak Muhammad Arshaka Salim dan istri Nachdawiyah peneliti yang selama ini selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan tesis .
10. Kepada Teman-Teman kelas, Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

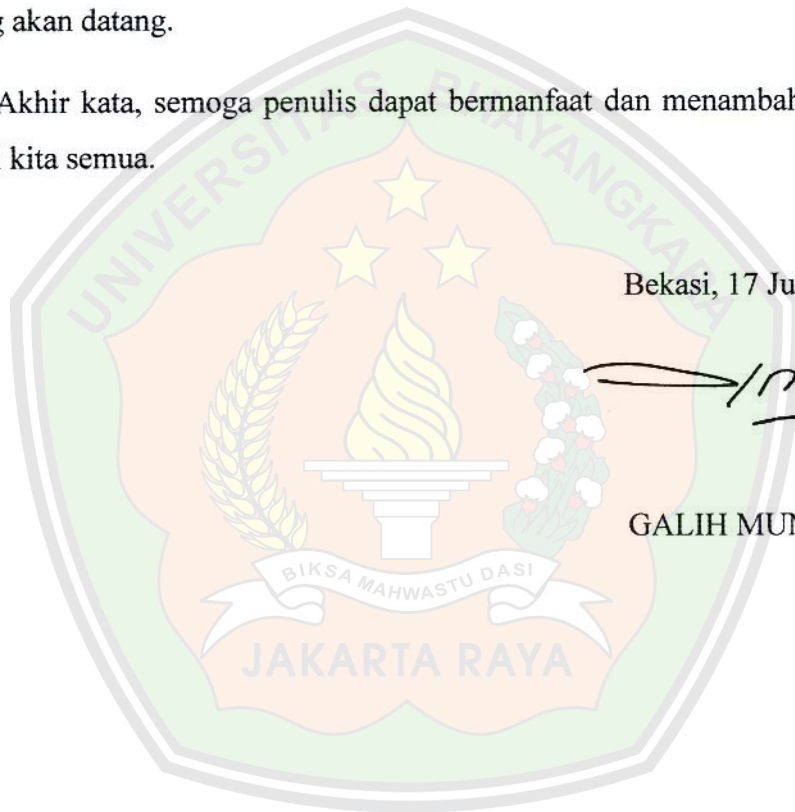
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruksi serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 17 Juli 2023



GALIH MUNANDAR



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	9
1.2.1 Rumusan Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kerangka Berfikir	11
1.4.1 Kerangka Konseptual	11
1.4.2 Kerangka Teoritis	12
1.4.2.1 Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>)	12
1.4.2.2 Teori Legalitas (<i>Middle Range Theory</i>)	15
1.4.2.3 Teori Kepastian Hukum (<i>Applied Theory</i>)	19
1.5. Metode Penelitian	23
1.6. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Hukum Pidana.....	28
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	28
2.1.2. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	39
2.2. Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	41
2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Dengan Hukum Acara Biasa Dalam Hukum Acara Pidana	41
2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Dengan Hukum Acara Cepat Dalam Hukum Acara Pidana.....	44
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan	47
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	47
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Ringan	49
 BAB III TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI DI PROVINSI DKI JAKARTA	 52
3.1. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	52
3.2. Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Pengadilan Negeri Di Provinsi DKI Jakarta	69
3.2.1. Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN.JKT.TIM	69
3.2.2. Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN.JKT.TIM	70
3.2.3. Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.JKT.BRT	71
3.2.4. Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.JKT.PST	72
3.2.5. Putusan Nomor 90/Pid.C/2020/PN.JKT.PST	74
3.2.6. Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.JKT.PST	76
3.2.7. Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR	77
3.2.8. Putusan Nomor 845/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR	79
3.2.9. Putusan Nomor 1159/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR	80
3.2.10. Putusan Nomor 919/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT	82

3.2.11. Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN.JKT.PST	84
 BAB IV ANALISA KENDALA PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI DI PROVINSI DKI JAKARTA	 87
4.1. Sanksi Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan	87
4.2. Urgensi Hukum Terkait Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Serta Memasukkan Ketentuan Yang Diatur Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 kedalam KUHP	117
 BAB V PENUTUP	129
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BNN	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KPK	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PN	PENGADILAN NEGERI
PPNS	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

JALAN ALLAH SWT ADALAH JALAN YANG PENUH LILLAH DAN
ALHAMDULILLAH

PERSEMBAHAN

KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA
KEPADA KEDUA MERTUA TERSAYANG
KEPADA ISTRI DAN ANAK TERCINTA DAN TERSAYANG
KEPADA SAUDARA-SAUDARIKU DAN REKAN-REKAN TERKASIH
KEPADA REKAN DAN ATASAN KERJA TERHORMAT

